



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

SPPMHKP PANGKALPINANG

TAHUN 2026

SPPMHKP PANGKALPINANG

BADAN MUTU KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP Pangkalpinang) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka BPPMHKP Pangkalpinang menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh BPPMHKP Pangkalpinang untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPPMHKP Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan BPPMHKP Pangkalpinang di tahun kedepannya.

Demikian RKT BPPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Pangkalpinang, 5 Januari 2026 Kepala
BPPMHKP Pangkalpinang



Dedy Ariet M. Satriyanto, S.St.Pi, M.Si
NIP.19780525 200003 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
Pendahuluan	6
Latar Belakang	6
Tugas dan Peran Organisasi	7
Tujuan	8
Manfaat.....	8
Sasaran	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	10
Arah Kebijakan	12
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	15
Penutup	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP TA 2026	15
Tabel 2. Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang Tahun 2026	17
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP Pangkalpinang tahun 2026	20

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan BPPMHKP Pangkalpinang 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Permen KKP Nomor 19 Tahun 2010 terkait pengendalian mutu menjadi Permen KP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan disetiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar

area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan *surveillance*. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu BPPMHKP Pangkalpinang sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT BPPMHKP Pangkalpinang cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan BPPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan BPPMHKP Pangkalpinang pada tahun 2026.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi

Kegiatan BPPMHKP Pangkalpinang dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan BPPMHKP Pangkalpinang adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan BPPMHKP Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP Pangkalpinang tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BPPMHKP Pangkalpinang pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat.
 - b) Inovasi dan Riset KP menguat.
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d) Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :

Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni :

Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,

- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor .
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan Balai PPMHKP tahun 2026 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-

kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Balai PPMHKP telah memperluas cakupan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi Balai

PPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan Balai PPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai PPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP.
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan

antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Balai PPMHKP Pangkalpinang telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, oleh karena itu Balai PPMHKP Pangkalpinang telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP Pangkalpinang TA 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT BKIPM Balikpapan (%)	70

		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
		5	Nilai kualitar penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (Nilai)	71,2
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (%)	100
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalpinang (Nilai)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (Indeks)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (%)	85

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (%)	76
		13	Perentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Pangkalpinang (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BKIPM Pangkalpinang (Nilai)	88
		15	Inovasi Pelayanan Publik Lingkup UPT UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG	1

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2026
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (%)	72

SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (%)	71
SK.3	Tatakelola Pemerintahan yang	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	82,5

	efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Pangkalpinang	5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	86,5
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (Persen)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	92,1
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	71,75
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (%)	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	3,5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT. Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu

hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standar dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu

lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan mutu ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan dari hulu ke hilir.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja BPPMHKP tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai PPMHKP Pangkalpinang tahun anggaran 2026 sebesar **Rp. 5.574.999.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai PPMHKP Pangkalpinang untuk

mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai PPMHKP Pangkalpinang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	142.427.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	81.500.000
3.	Dukuman Manajemen internal Lingkup Badan Pengendalian dan Penagawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.996.182.000
Total Anggaran BPPMHKP Pangkalpinang Tahun 2025		5.220.109.000

Penutup

Rencana kerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan pada T.A 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan BPPMHKP Pangkalpinang antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Dukuman Manajemen internal Lingkup Badan Pengendalian dan Penagawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Balai PPMHKP Pangkalpinang pada tahun 2026 sebesar **Rp. 5.220.109.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 4.996.182.000,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 81.500.000,-**
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 142.427.000,-**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	142.427.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	81.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.996.182.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026		5.220.109.000,

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Pangkalpinang



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dedy Arief Hendriyanto

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649699)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 5,220,109,000	

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			223,927,000		
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			142,427,000		
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	105.0 produk		97,313,000		
3989.PDC.002 051 A 521211 						

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649699)

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 5,220,109,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) > Inspeksi/Verifikasi/Surveilen SKP Uang Harian Perjalanan Inspeksi/Verifikasi/Surveilen - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) [5 ORG x 2 KALI] Hotel/Penginapan Inspeksi/Verifikasi/Surveilen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) [3 ORG x 2 KALI x 1 HARI] - Tiket dan Transportasi Inspeksi/Verifikasi/Surveilen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) [3 ORG x 2 KALI] > Pembentukan Noreg Inspektur Mutu - Uang Harian Perjalanan Noreg Inspektur Mutu [1 ORG x 1 KALI x 3 HARI] - Hotel/Penginapan Kegiatan Noreg Inspektur Mutu [1 ORG x 1 KALI x 2 HARI] - Tiket dan Transportasi Noreg Inspektur Mutu [1 ORG x 1 KALI] Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (73 sertifikat)	10.0 OH	410,000	20,938,000	A	PNP
				14,900,000		
				4,100,000	*	
		6.0 OH	400,000	2,400,000	*	
		6.0 OK	1,400,000	8,400,000	*	
				6,038,000		
		3.0 OH	480,000	1,440,000	*	
		2.0 OH	500,000	1,000,000	*	
		1.0 OK	3,598,000	3,598,000	*	
C	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			16,375,000		
524111	> Inspeksi/Verifikasi/Surveilen HACCP - Uang Harian Perjalanan Inspeksi/Verifikasi/Surveilen HACCP [3 ORG x 3 KALI x 2 HARI] - Hotel/Penginapan Inspeksi/Verifikasi/Surveilen HACCP [3 ORG x 3 KALI x 1 HARI] - Tiket dan Transportasi Inspeksi/Verifikasi/Surveilen HACCP [2 ORG x 2 KALI] Bahan Laboratorium	18.0 OH	410,000	7,380,000		
		9.0 OH	400,000	3,600,000		
		4.0 OK	1,348,750	5,395,000		
D	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			40,000,000		
521821	- Bahan Laboratorium Pengujian Mutu [1 PKT]			40,000,000	A	PNP
	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	1.0 PAKET	40,000,000	40,000,000	*	
3989.PDF		34.0 Lembaga, Badan Usaha		39,114,000		
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA PANGKALPINANG Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	34.0 Lembaga		39,114,000		
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			39,114,000	U	
A	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan			27,550,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Konsumsi dan Snack Help Desk/Sosialisasi CBIB [30 ORG x 1 KALI]	30.0 OK	65,000	1,950,000		RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 5,220,109,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Pembenihan Ikan [3 ORG x 1 LOKAS x 2 HARI] - Tiket Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Pembenihan Ikan Belitung [3 ORG x 2 HARI] - Hotel/Penginapan Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Pembenihan Ikan Belitung [3 ORG x 1 Hari]			25,600,000	RM
	<u>Sertifikasi CPIB pada Pembenihan</u>	42.0 OH	410,000	17,220,000	
	<u>Belanja Bahan</u>	3.0 OK	1,500,000	4,500,000	
	<u>Sertifikasi CPIB pada Pembenihan</u>	6.0 OH	410,000	2,460,000	
	<u>Belanja Bahan</u>	3.0 OH	473,500	1,420,000	
B	(KPPN.015-Pangkal Pinang) - Konsumsi dan Snack Help Desk/Sosialisasi CBIB [5 ORG x 1 KALI]			3,237,000	
521211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Pembenihan [4 ORG]			285,000	RM
524111	<u>Sertifikasi CPPIB pada usaha Produksi Pakan Ikan</u>	5.0 OK	57,100	285,000	
	<u>Belanja Bahan</u>			2,952,000	RM
	(KPPN.015-Pangkal Pinang) - Konsumsi dan Snack Help Desk/Sosialisasi CPPIB [5 ORG x 1 KALI]	8.0 OH	369,000	2,952,000	
C	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			1,915,000	
521211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPPIB pada usaha Produksi Pakan Ikan [2 ORG x 1 LOKAS x 2 KALI]			275,000	RM
524111	<u>Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan</u>	5.0 OK	55,000	275,000	
	<u>Belanja Bahan</u>			1,640,000	RM
	(KPPN.015-Pangkal Pinang) - Konsumsi dan Snack Help Desk/Sosialisasi CPIB Kapal [25 ORG x 1 KALI]	4.0 OH	410,000	1,640,000	
D	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan [3 ORG x 2 LOKAS x 1 HARI x 1 KALI] - Tiket Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Belitung			6,412,000	
521211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Belitung [1 ORH x 3 HARI] - Hotel/Penginapan Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Belitung	25.0 OK	42,400	1,060,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Uang Harian Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Belitung [1 ORH x 3 HARI] - Hotel/Penginapan Inspeksi Penerapan Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Belitung	6.0 OH	410,000	2,460,000	
	<u>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]</u>	1.0 OH	1,192,000	1,192,000	
		3.0 OH	400,000	1,200,000	
		1.0 OH	500,000	500,000	
3989.QIC		14.0 Lembaga		6,000,000	
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA PANGKALPINANG UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	13.0 Lembaga		5,000,000	
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu			5,000,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649699)

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 5,220,109,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
A	dan Keamanan Hasil Perikanan					
	Temu Teknis Sertifikasi Mutu			5,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4,120,000	A	PNP
	(KPPN.015-Pangkal Pinang)					
	- Tiket dan Transport Temu Teknis Sertifikasi Mutu [1	1.0 OK	2,260,000	2,260,000	*	
	- Uang Harian Temu Teknis Sertifikasi Mutu [1 ORG x 2					
	- Hotel dan Penginapan Temu Teknis Sertifikasi Mutu [1	2.0 OH	530,000	1,060,000		
	- ORG x 2 HARI]					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	(KPPN.015-Pangkal Pinang)	2.0 OH	400,000	800,000		
524113	- Perdin evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP pada			880,000	A	PNP
	UPI[2 ORG x 1 HARI x 4 LOKAS]					
	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem	8.0 OH	110,000	880,000	*	
	jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan					
	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem					
	jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.0 Lembaga		1,000,000		
3989.QIC.003	Jumlah Unit produksi primer yang konsisten menerapkan					
	sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan					
051	Belanja Bahan			1,000,000	U	
A	(KPPN.015-Pangkal Pinang)			1,000,000		
	- Surveillance dan Pengambilan serta Pengujian Contoh					
521211	CPIS Kapal			1,000,000	A	PNP
	Manajemen Mutu					
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	*	
7010				81,500,000		
7010.PBR		1.0 Rekomendasi		42,500,000		
		Kebijakan				
	Lokasi : KOTA PANGKALPINANG					
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi	1.0 Rekomendasi		42,500,000		
	di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan	Kebijakan				
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			42,500,000	U	
A	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu			37,500,000		
	laboratorium ISO 17020					
522191	Belanja Jasa Lainnya			29,000,000	A	PNP
	(KPPN.015-Pangkal Pinang)					
	- Biaya Asesment ISO 17020	1.0 PKT	21,000,000	21,000,000	*	
	- Biaya pertanggunggugatan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000		
	- Biaya pendaftaran	1.0 Skema	5,000,000	5,000,000		
	- luran Tahunan	1.0 Tahun	1,500,000	1,500,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8,500,000	A	PNP
	(KPPN.015-Pangkal Pinang)					
	- Tiket dan Perjalanan Asesor 17020	2.0 OK	1,960,000	3,920,000	*	
	- Uang Harian Asesor 17020 [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	410,000	2,460,000	*	
	- Hotel dan Penginapan Asesor 17020 [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	530,000	2,120,000	*	
B	Pelatihan ISO 17020			5,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 5,220,109,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Tiket dan Perjalanan Pelatihan ISO 17020 - Uang Harian Pelatihan ISO 17020 [1 ORG x 3 HARI] - Hotel dan Penginapan Pelatihan ISO 17020 [1 ORG x 2 HARI] <u>Standarisasi Lembaga[Base Line]</u>	1.0 OK 3.0 OH 2.0 OH 1.0 Lembaga	2,350,000 530,000 530,000 	5,000,000 2,350,000 1,590,000 1,060,000 39,000,000	A * * *
7010.PDD					PNP
7010.PDD.002	Lokasi : KOTA PANGKALPINANG Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi <i>Asesmen (surveilen/reakreditasi) ISO 17025</i>	1.0 Lembaga		39,000,000	
051				39,000,000	U
A				39,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Biaya Asesment - Biaya pendaftaran - Uji Profisiensi/Banding - Iuran Tahunan	1.0 PKT 1.0 Skema 5.0 Uji 1.0 Tahun	14,000,000 5,000,000 2,000,000 1,500,000	30,500,000 14,000,000 5,000,000 10,000,000 1,500,000	A * * *
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Tiket dan Perjalanan Asesor 17025 - Uang Harian Asesor 17025 [2 ORG x 3 HARI] - Hotel dan Penginapan Asesor 17025 [2 ORG x 2 HARI]	2.0 OK 6.0 OH 4.0 OH	1,960,000 410,000 530,000	8,500,000 3,920,000 2,460,000 2,120,000	A * *
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			4,996,182,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			4,996,182,000	
3987.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,996,182,000	
3987.EBA.962	Lokasi : KOTA PANGKALPINANG Layanan Umum	1.0 Layanan		64,356,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			64,356,000	U
A	<i>Administrasi Keuangan</i>			14,848,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Tiket dan Transport Penyelarasan Data SAIBA dan BMN Semester I dan II Lingkup ES I [4 ORG x 1 KALI] Hotel dan penginapan Penyelarasan Data SAIBA dan BMN Semester I dan II Lingkup ES I [2 ORG x 1 KALI x 2 HARI] Uang Harian Penyelarasan Data SAIBA dan BMN Semester I dan II Lingkup ES I [4 ORG x 1 KALI x 2 HARI] WBK	4.0 OK 4.0 OH 8.0 OH	2,152,000 500,000 530,000	14,848,000 8,608,000 2,000,000 4,240,000 7,424,000	
B					RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 5,220,109,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Tiket dan Transport Koordinasi ZI WBK ke Pusat - Hotel dan Penginapan Koordinasi ZI WBK ke Pusat [2 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Koordinasi ZI WBK ke Pusat [2 ORG x 2 HARI] Program Prioritas Mutu Primer dan Pasca Panen	2.0 OK 4.0 OK 4.0 OK	2,000,000 356,000 500,000	7,424,000 4,000,000 1,424,000 2,000,000	RM
C	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			4,672,000	
524111	- Tiket dan Transport Perjalanan Teknis Program Prioritas Mutu Primer dan Pasca Panen - Hotel dan Penginapan Perjalanan Teknis Program Prioritas Mutu Primer dan Pasca Panen [1 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Perjalanan Teknis Program Prioritas Mutu Primer dan Pasca Panen [1 ORG x 3 HARI] Sistem Akuntabilitas Kinerja	1.0 OK 2.0 OK	2,082,000 500,000	4,672,000 2,082,000 1,000,000	RM
D	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Perjalanan Identifikasi Sasaran Kinerja dan Program Prioritas Pengelolaan umum	3.0 OK	530,000	1,590,000 1,856,000 1,856,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)	1.0 OK	1,856,000	1,856,000	RM
E	- Tiket dan Transport Pengembangan Pegawai - Hotel dan Penginapan Perjalanan Pengembangan Pegawai [2 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Perjalanan Pengembangan Pegawai [2 ORG x 3 HARI] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	2.0 OK 4.0 OK	2,000,000 444,500	8,958,000 8,958,000 4,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Tiket dan Transport Penyusunan Program dan Anggaran - Hotel dan Penginapan Penyusunan Program dan Anggaran [1 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Penyusunan Program dan Anggaran [2 ORG x 2 Hari] RKBMN	6.0 OK	530,000	1,778,000 3,180,000 6,972,000 6,972,000	
F	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Tiket dan Transport Perjalanan Rekonsiliasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara - Hotel dan Penginapan Perjalanan Rekonsiliasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara [1 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Perjalanan Rekonsiliasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara [1 ORG x 3 HARI] Koordinasi Program	2.0 OK 2.0 OH 4.0 OH	1,926,000 500,000 530,000	3,852,000 1,000,000 2,120,000 4,554,000	
G	524111			4,554,000	RM
		1.0 OK	2,000,000	2,000,000	
		2.0 OH	482,000	964,000	
		3.0 OH	530,000	1,590,000	
H				7,728,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 5,220,109,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Tiket dan Transport Koordinasi Program dan Anggaran - Hotel dan Penginapan Koordinasi Program dan Anggaran [1 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Koordinasi Program dan Anggaran [2 ORG x 3 HARI] <i>Penyusunan Rencana Umum Pengadaan</i>	2.0 OK 2.0 OH 6.0 OH	1,864,000 500,000 500,000	3,728,000 1,000,000 3,000,000	RM
I	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			3,712,000	
524111	- Tiket dan Transport Perjalanan Penyusunan RUP - Hotel dan Penginapan Perjalanan Penyusunan RUP [1 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Perjalanan Rekonsiliasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara [1 ORG x 2 HARI] <i>PPID</i>	1.0 OK 2.0 OH	2,000,000 356,000	2,000,000 712,000	RM
J	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)	2.0 OH	500,000	1,000,000	
524111	- Tiket dan Transport Perjalanan Penyusunan RUP - Hotel dan Penginapan Perjalanan Penyusunan RUP [1 ORG x 2 HARI] - Uang Harian Perjalanan Rekonsiliasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara [1 ORG x 2 HARI] Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan <i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>	1.0 OK 2.0 OH 2.0 OH	2,000,000 356,000 460,000	2,000,000 712,000 920,000	RM
3987.EBA.994	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)	1.0 Layanan		4,931,826,000	
001	- Belanja Gaji Pokok PNS			3,676,921,000	U
A	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)			3,676,921,000	
511111	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)			954,530,000	RM
	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)	1.0 THN	820,036,685	820,037,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 BLN	67,332,441	67,332,000	
511119	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	67,161,256	67,161,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)			30,000	RM
	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)	1.0 THN	23,687	24,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 BLN	3,424	3,000	
511121	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,424	3,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)			113,751,000	RM
		1.0 THN	95,673,141	95,673,000	
		1.0 BLN	9,038,568	9,039,000	
		1.0 BLN	9,038,568	9,039,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 5,220,109,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	31,230,960 2,787,911 2,787,911	36,807,000 31,231,000 2,788,000 2,788,000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	10,564,560 880,380 880,380	12,325,000 10,565,000 880,000 880,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) - Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN 1.0 THN 1.0 BLN	7,214,225 73,291,635 7,214,225	87,720,000 7,214,000 73,292,000 7,214,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	8,661,961 2,551,146 2,551,146	13,764,000 8,662,000 2,551,000 2,551,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	86,496,552	86,497,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	216,000,000	216,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	17,196,756 1,433,063 2,902,319	21,532,000 17,197,000 1,433,000 2,902,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Gaji PPPK Paruh Waktu - Belanja Gaji Pokok PPPK - Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji 13) - Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji 14)	13.0 BLN 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	3,900,000 200,681,582 24,455,000 24,455,000	300,291,000 50,700,000 200,681,000 24,455,000 24,455,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	50,000	50,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649699)

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 5,220,109,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			3,776,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,775,852	3,776,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			699,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	699,413	699,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			3,360,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	3,360,000	3,360,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			2,763,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	2,763,415	2,763,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			72,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	72,000,000	72,000,000	
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			14,012,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.0 THN	14,012,000	14,012,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			29,885,000	RM
	- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pegawai [19 ORG x 3 JAM x 8 KALH]	456.0 OJ	65,539	29,885,000	
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			4,404,000	RM
	- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pegawai PPPK	1.0 THN	4,404,000	4,404,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			1,373,920,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja PNS	1.0 THN	1,373,920,200	1,373,920,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			328,805,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	328,805,400	328,805,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,254,905,000	U
B	<i>Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu</i>			13,900,000	
	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			9,900,000	RM
521111	- Biaya Konsumsi Jamuan Makan	12.0 BLN	825,000	9,900,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			4,000,000	RM
	- Sewa Kendaraan Tamu Insidentil	4.0 Hari	1,000,000	4,000,000	
C	<i>Perawatan Gedung Kantor</i>			180,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649699)

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 5,220,109,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			180,000,000	RM
D	- Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor	1000.0 M2	180,000	180,000,000	
	Perbaikan barang Inventaris Kantor			57,007,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			25,588,000	RM
	- Jasa Kalibrasi Alat LAB	1.0 THN	25,588,000	25,588,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			31,419,000	RM
E	- Komputer	10.0 UNIT	730,000	7,300,000	
	- Printer	10.0 UNIT	690,000	6,900,000	
	- Laptop	10.0 UNIT	730,000	7,300,000	
	- CCTV	1.0 SET	2,509,000	2,509,000	
	- Pemeliharaan server	1.0 THN	7,410,000	7,410,000	
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda -4			92,736,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			92,736,000	RM
F	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Bangka Belitung)	1.0 UNIT	34,376,191	34,376,000	
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Bangka Belitung)	2.0 UNIT	29,180,000	58,360,000	
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda - 2			46,084,000	
	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			46,084,000	RM
523121	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kend Roda 2	10.0 UNIT	4,608,400	46,084,000	
G	Perawatan Sarana Gedung			17,910,000	
	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			17,910,000	RM
H	- Pemeliharaan Genset 100 KVA	1.0 UNIT	10,110,000	10,110,000	
	- Perawatan AC	12.0 UNIT	650,000	7,800,000	
	Langganan Daya dan Jasa			195,639,000	
	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			150,000,000	RM
522111	- Listrik Kantor S.K.I	12.0 BLN	12,500,000	150,000,000	
I	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			45,639,000	RM
	- Biaya langganan telpon dan Internet	12.0 BLN	3,803,279	45,639,000	
	Operasional Kantor dan Pimpinan			651,629,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649699)

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 5,220,109,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			32,920,000	RM
	- Keperluan Operasional Kantor	1.0 THN	22,620,000	22,620,000	
	- Blaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4	2.0 UNIT	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Perpanjangan Kendaraan Roda 4 Double Gardan	1.0 UNIT	3,000,000	3,000,000	
	- Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor Roda 2	11.0 UNIT	300,000	3,300,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			8,217,000	RM
	- Biaya Pengiriman Pos	12.0 BLN	684,750	8,217,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			75,480,000	RM
	> Pengelola Anggaran			59,640,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)				
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	1,180,000	14,160,000	
	- Honorarium Pejabat Pengumpul Labihan Penandatanganan Sopir (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)				
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	1,150,000	13,800,000	
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [2 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	>> Pengelola PNB				
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Honor (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta)	12.0 OB	410,000	4,920,000	
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnb (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta)	24.0 OB	300,000	7,200,000	
	- Honorarium Anggota Pengelola Pnb (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta) [2 ORG x 12 BLN]				
	> SAKPA	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Penanggung Jawab			10,320,000	
	- Koordinator	12.0 OB	260,000	3,120,000	
	- Ketua	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Anggota [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	200,000	4,800,000	
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.015-Pangkal Pinang)			15,840,000	
	- Belanja Bahan/Alat Rumah Tangga LAB	12.0 OB	360,000	4,320,000	
	- Belanja Bahan Sanitasi LAB	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Bahan Operasional Administrasi dan Pelayanan	12.0 OB	240,000	2,880,000	
	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>	24.0 OB	210,000	5,040,000	
521811	(KPPN.015-Pangkal Pinang)			28,012,000	RM
	- Jasa Outsourcing Tenaga Satpam/Keamanan [4 ORG x 13 BLN]				
	- Jasa Outsourcing Pramubakti Kantor [4 ORG x 13 BLN]	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Jasa Outsourcing Tenaga Driver [2 ORG x 13 BLN]	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
		1.0 THN	20,812,000	20,812,000	
522191				507,000,000	RM
		52.0 OB	3,900,000	202,800,000	
		52.0 OB	3,900,000	202,800,000	
		26.0 OB	3,900,000	101,400,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir



DEDY ARIF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP 197805252000031002

Pangkalpinang, 2 Januari 2026